

| ARTIKEL PENELITIAN

Urgensi Koordinasi dalam Organisasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka

Ahmad Aldizar Akbar¹, Hamidah Dwiningtias¹, Hayatul Khairul Rahmat^{1*}

¹Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: hayatul.khairulrahmat@budiluhur.ac.id

| ABSTRACT

As a country in the ring of fire, Indonesia is very vulnerable to disasters, such as volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods, landslides and tornadoes. This research aims to find out how important coordination is in disaster emergency response organizations. The method used in this research is the library method. The findings from this research are that good coordination between institutions will produce common goals and achieve targets effectively. The command system is one way of coordinating between institutions or stakeholders in emergency response activities. Command has an important role in mapping the situation, disaster victim data, volunteer data, aid data, as well as donor information that helps in emergency response.

| KEYWORDS

Coordination; Disaster; Response.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berada di wilayah *ring of fire*, Indonesia sangatlah rentan terhadap bencana alam, ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua antara lain Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak pada jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Benua Eurasia dan dengan adanya proses penunjaman ini, Indonesia memiliki deretan gunung api yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi yang menjadikan Indonesia rentan akan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ancaman bencana yang sangat banyak membuat semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan. Masyarakat dapat terancam keselamatannya akibat dari proses bencana. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan pencegahan, penanganan, serta penanggulangan bencana alam. Sadar bahwa Indonesia berada pada negara dengan kerawanan bencana yang sangat tinggi, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga khusus yang menangani bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disingkat dengan BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggara penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangan.

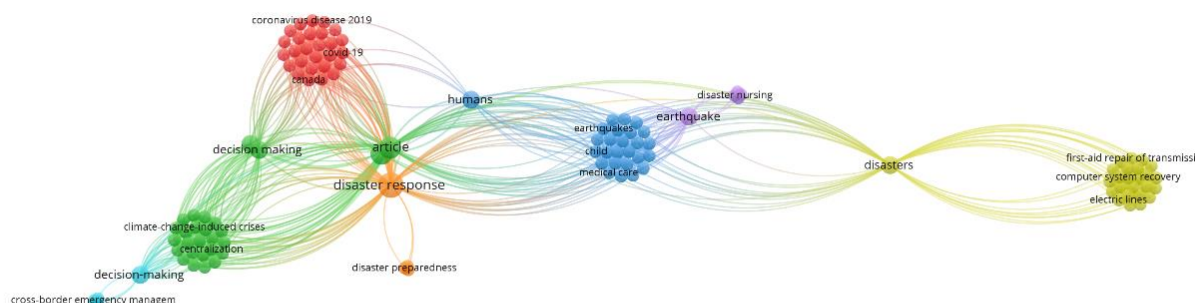
Canton (dalam Achadi, 2023) menyebutkan bahwa tanggap darurat merupakan sebuah praktik khusus dari teoritis operasi darurat, taktik, sumber daya, dan keterampilan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan organisasi yang terkoordinasi. Jika dilakukan secara cepat dan tepat, maka akan sesuai dengan tuntutan keadaan, dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam tanggap darurat, terdapat suatu rangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Selain itu, pada fase ini dibutuhkan sistem komando dalam penanganan penanggulangan dampak secara efektif dan efisien untuk mengendalikan ancaman/ penyebab saat keadaan darurat. Sistem komando berfungsi sebagai mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana, memantau mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana, melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana, dan mengkoordinasikan instansi/ lembaga terkait.

Koordinasi yang kurang baik dalam sebuah organisasi tanggap darurat akan menyebabkan adanya informasi yang kurang akurat dan dapat menimbulkan beberapa kendala di lapangan. Sering terjadi dalam fase tanggap darurat tidak adanya koordinasi antara NGO dan pemerintah daerah yang menyebabkan pemerintah tidak mengetahui informasi mengenai NGO tersebut, tidak adanya koordinasi terkait penanganan tanggap darurat bencana, sulit melakukan koordinasi karena semua elemen fokus mengevaluasi diri dan keluarga masing-masing (Achadi, 2023).

Ariyanto (2018) menyebutkan bahwa fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh BPBD di Kabupaten Ciamis belum menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini terlihat dari pelayanan dan mekanisme penanganan bencana yang masih bersifat parsial. Setelah berbagai penguatan landasan hukum, kelembagaan dan pengalaman penanganan bencana ternyata masih ada persoalan lapangan maupun secara konseptual (Budi HH, 2012). Selain itu, persoalan utama dalam hal ini adalah komunikasi, informasi, koordinasi dan kerjasama. Banyak aspek yang masih problematik seperti kecepatan, ketepatan, keakuratan-keandalan, komunikasi dan informasi (kesimpangsiuran informasi, berbagai tindakan yang tidak tepat sasaran seperti logistik tidak merata, ketimpangtindihan antarsektor) (Tamitiadin et al, 2019).

Hal yang sangat penting dalam penanggulangan bencana ialah koordinasi, karena dengan adanya koordinasi para instansi, stakeholder atau pemangku kepentingan akan sadar dengan tugas dan perannya di dalam suatu bencana tersebut. Koordinasi yang baik akan menyebabkan keefektifan dalam melakukan respon cepat atas bencana yang terjadi, koordinasi dilakukan dengan unsur-unsur yang berkaitan dalam upaya penanggulangan bencana (Muzdalifah, 2023). Menggunakan VOSViewer didapatkan tren riset mengenai koordinasi dalam organisasi tanggap darurat bencana seperti **Gambar 1**.



Gambar 1. Tren Penelitian Koordinasi dalam Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali urgensi koordinasi dalam organisasi komando tanggap darurat bencana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data atau informasi dengan tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan. Metode penelitian pustaka (*library research*) adalah metode yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku maupun karya ilmiah lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi, dimana teknik penelitian ini dilakukan secara objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Tanggap Darurat Bencana dan Perlu Hadirnya Koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana

Tanggap darurat adalah fase dimana dilakukannya tindakan untuk mengurangi dampak dari akibat bencana, baik akibat yang akan terjadi, sedang terjadi maupun yang telah terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalisir akibat dari bencana, kehilangan nyawa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab VI Pasal 54, mengatakan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Di tengah situasi tanggap darurat, masyarakat yang terdampak dihadapkan dengan kondisi yang tidak pasti, seperti mengenai informasi titik aman, lokasi pengungsian, kondisi harta benda mereka, pendidikan dan relokasi. pada posisi seperti ini komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang penting, karena pada saat kondisi yang tidak kondusif ini diperlukannya tindakan yang cepat agar tidak menimbulkan masalah baru (Lubis et al., 2019).

Koordinasi merupakan suatu kerja sama antara, instansi, badan unit sampai kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi atau kegiatan agar dapat saling membantu mengisi dan melengkapi, sehingga tujuan bersama bisa tercapai dengan baik. Koordinasi merupakan tantangan utama di antara individu, kelompok, dan organisasi dalam rangka merespon bencana Bahadori (dalam Muzdalifah, 2023). Beberapa penelitian mengatakan bahwa koordinasi antar lembaga yang baik akan menghasilkan tujuan bersama dan mencapai sasaran secara efektif, meningkatkan kapasitas lokal, meningkatkan keterlibatan partisipan dan mencegah dampak berkelanjutan. Ramdani (dalam Muzdalifah, 2023), lemahnya koordinasi mengakibatkan kegagalan antarlembaga dalam mencapai sasaran secara efektif. Hal tersebut didukung dengan beberapa penelitian yang ditemukan.

Pada penelitian yang dilakukan (Lubis et al., 2019) mengenai penanganan bencana terdapat persoalan utama lapangan yaitu komunikasi, informasi, koordinasi, dan kerjasama. Kesimpangsiuran informasi masih menjadi problematik dari aspek kecepatan, ketepatan, keakuratan, aspek komunikasi dan informasi, tumpang tindih antar sektor dalam penanganan bencana masih sering terjadi. Warga tidak memperoleh informasi yang valid mengenai kondisi di lokasi pengungsian, warga seringkali berpindah lokasi tanpa ada informasi sebelumnya. Informasi mengenai perpindahan lokasi hanya disampaikan melalui lisan oleh TNI, tidak ada pengumuman agar warga dapat bersiap-siap sebelumnya.

Muzdalifah (2023) menjelaskan bahwa hasil yang baik dalam aspek kesadaran urgensi koordinasi ditunjukkan dengan adanya rapat untuk pembagian tugas dan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Kemudian ditindak lanjuti dengan melaksanakan rapat untuk membahas tanggap darurat oleh instansi-instansi yang berada dalam struktur komando. Pada saat tanggap darurat, sudah berjalan sesuai tugas sebagaimana mestinya berdasarkan SK Gubernur tentang tanggap darurat bencana. koordinasi dilakukan dengan menggunakan media Pusdalop (Pusat Pengendalian

Operasi Penanggulangan Bencana), pada tahap ini pihak-pihak yang berada pada tanggap darurat telah mengetahui tugas dan fungsinya sehingga berjalan dengan baik.

Pentingnya koordinasi agar semua tugas dan fungsi terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Sifat-sifat koordinasi menurut Hasibuan (dalam Ariyanto, 2018) yaitu: (1) koordinasi adalah dinamis bukan statis, (2) koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran, dan (3) koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu koordinasi, menurut Handyaningrat (dalam Ariyanto, 2018) yaitu: (1) kompleksnya fungsi dan kegiatan yang secara khusus dilakukan oleh berbagai unit atau perorangan, (2) bertambahnya pengkhususan-pengkhususan terhadap berbagai kegiatan sehingga memperbesar struktur itu sendiri, dan (3) semakin kompleksnya dan besarnya struktur organisasi menambah pula masalah koordinasi, termasuk rentang pengendalian (*span of control*) termasuk juga dalam masalah koordinasi.

Roestoto (dalam Muzdalifah, 2023) menyebutkan pemerintah memiliki peran pada koordinasi respon cepat di fase tanggap darurat seperti: BNPB, Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). *Joined-Up Government* merupakan model tata pemerintahan yang mengedepankan aspek koordinasi yang kuat di antara lembaga pemerintah dalam mengelola isu publik tertentu. Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional, atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana.

Terdapat tiga model koordinasi antar pemerintah yaitu terdiri dari koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Koordinasi vertikal adalah koordinasi dimana terdapat hierarki antara yang mengkoordinasikan secara struktural pada satu garis komando (*line of command*). Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional di mana yang mengkoordinasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi tingkatnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi tetap dalam satu garis komando (*line of command*). Koordinasi horizontal adalah koordinasi fungsional yang kedudukannya setingkat antara yang mengkoordinasikan dan yang di koordinasikan. Pada pelaksanaannya menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana. Fungsi dari komando yakni sebagai pimpinan dalam sebuah kegiatan (Muzdalifah, 2023)

Konsepsi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. Fungsi sistem komando penanganan darurat bencana ini ialah agar pada saat penanganan tanggap darurat dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/ organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya (Oktarina et al, 2010). Komando memiliki peran penting dalam pemetaan situasi, data korban bencana, data relawan, data bantuan serta informasi donatur yang membantu dalam tanggap darurat. Beberapa kendala komando yang terjadi pada saat di lapangan, seperti: (1) perubahan pengungsi secara dinamis, antara pengungsi baru masuk dan pengungsi yang berpindah lokasi, (2) bantuan dari sejumlah donatur yang datang sewaktu-waktu dengan berbagai macam bentuk, (3) kurangnya kerjasama antar komando yang ada di lapangan dengan koordinator yang dikelola oleh pemerintah sehingga penanganan kurang efektif dan efisien, dan (4) tuntutan ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan terintegrasi (Siswanto, 2017).

Priambodo et al. (2020) menjelaskan komando tersebut ialah melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, baik dari pemerintah maupun instansi dan organisasi masyarakat. Koordinasi

dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan akademisi dan media, koordinasi dilakukan secara intensif mengenai informasi terbaru. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa untuk mempermudah komunikasi baik secara individu ataupun kelompok dapat memanfaatkan media sosial yang memiliki akses penyampaian informasi yang cepat, efisien, dan efektif. Selain itu, melalui komando juga dapat membuat jaringan komunikasi melalui radio dengan frekuensi yang telah disetujui bersama, sehingga komunikasi dan koordinasi tetap dapat dilakukan dengan baik (Priambodo et al., 2020).

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bentuk koordinasi dan mekanisme tata kerja antar instansi terkait, formulasi ini dapat digunakan sebagai metode koordinasi antara lain: (1) koordinasi lewat kewenangan, menciptakan koordinasi yang efektif, (2) koordinasi melalui konsensus yaitu dengan melalui motivasi sebagai kepentingan bersama, saling berkaitan membantu/ membutuhkan melalui ide, (3) koordinasi melalui pedoman kerja, dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang, tata kerja dan prosedur kerja agar sinkron antara gerak dan tindakan yang tertuang dalam pedoman/ petunjuk, (4) koordinasi melalui forum, menggunakan suatu wadah yang dapat digunakan dalam bertukar informasi, konsultasi, memecahkan suatu masalah, serta hal lain, (5) koordinasi melalui konferensi, koordinasi ini melalui sidang-sidang antara pimpinan dan pelaksana dalam pengambilan keputusan mengenai masalah yang ada pada pelaksanaan.

Mekanisme tata kerja antar instansi yang dapat digunakan antara lain: (1) kebijaksanaan sebagai penentu arah tujuan, (2) rencana yang di dalamnya terdapat cara pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan siapa yang melakukannya, dan (3) prosedur dan tata kerja. Koordinasi antar sektor merupakan sebuah komponen yang bersama-sama dan saling berkesinambungan dalam membentuk sistem dan berada dalam satu sistem yang lebih besar sehingga keberhasilan koordinasi tergantung pada sejauhmana sebuah sektor memenuhi tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya yang sudah ditetapkan sebelumnya (Akmal, 2006).

Seberapa Pentingkah Koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana?: Sebuah Ulasan Singkat

Komando tanggap darurat bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/ organisasi terkait untuk pengalokasian sumber daya. Fasilitas komando tanggap darurat bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana yang dapat terdiri dari pusat komando, personil komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, sarana dan prasarana komunikasi serta informasi (Kurniawan, 2018). Fungsi koordinasi dalam penanganan tanggap darurat bencana sangat diperlukan, karena banyaknya keterlibatan stakeholder kebencanaan pada saat keadaan darurat. Tujuan koordinasi dalam kebencanaan adalah berupa efektifitas terhadap respon bencana, koordinasi yang baik sering terbukti dapat mengurangi kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana dan merupakan faktor utama dalam kesuksesan di penanganan bencana. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan kegagalan pada sebuah tanggap darurat bencana, untuk itu perlu membuat sistem koordinasi yang baik dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Keikutsertaan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat pada tanggap darurat, koordinasi dilaksanakan melalui proses yang disepakati bersama. seseorang atau badan yang telah ditunjuk sebagai koordinator harus mampu membangun suasana yang baik dan saling menghormati antara setiap pemangku kepentingan.
- b. Tidak memiliki keterpihakan pada sesuatu (imparsial).
- c. Dilakukan dengan transparan. Koordinasi membutuhkan kepercayaan dari semua stakeholder/ pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pemberian informasi harus dilakukan secara transparan.

- d. Bermanfaat terhadap masyarakat yang terdampak bencana maupun pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana. Muzdalifah (2023) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan hasil lebih baik dikarenakan pentingnya koordinasi, menyebabkan pengambilan keputusan tanggap darurat telah baik. Ini ditandai dengan instansi terkait dapat mengambil keputusan pembagian tugas yang jelas selama situasi tanggap darurat dan telah dilaksanakan dengan baik.

SIMPULAN

Koordinasi merupakan suatu bentuk kerja sama antara, instansi, badan unit sampai kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi atau kegiatan agar dapat saling membantu mengisi dan melengkapi, sehingga tujuan bersama bisa tercapai dengan baik. Dengan koordinasi yang baik maka akan menghasilkan tujuan bersama dan mencapai sasaran secara efektif, sebaliknya jika koordinasi tersebut lemah maka akan menimbulkan kegagalan dalam pencapaian tujuan bersama yang berdampak pada ketidak efektifan tindakan. Dengan adanya struktur komando ini akan terbangun tata hubungan kerja yang memungkinkan terjadinya peningkatan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang efektif dan efisien pada masa tanggap darurat bencana alam dan dapat meminimalisasi kerugian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achadi, A. H. (2023). *Kepemimpinan Kolaboratif Pada Tanggap Darurat Bencana*. Deepublish.
- [2] Akmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *Demokrasi*, 5(1), 1–11.
- [3] Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Management Review*, 2(1), 161. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118>
- [4] Budi HH, S. (2012). Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama). *Jurnal ASPIKOM*, 1(4), 362. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i4.36>
- [5] Kurniawan, M. K. (Desember, 2018). Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- [6] Lubis, F. W., Sabarina, Y., & Masril, M. (2019). Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Ditinjau dari Aspek Komunikasi dan Koordinasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v5i1.2258>
- [7] Muzdalifah, S. (2023). Efektivitas koordinasi badan penanggulangan bencana daerah (bpbdd) provinsi dalam penanggulangan banjir di kalimantan selatan. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 238–250. <https://doi.org/10.33506/jn/v8i2.1898>
- [8] Oktarina, R., & Gustamola, W. (2010). Pemetaan Sistem Konfigurasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia.
- [9] Perkasa, A. (2019). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbdd) Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kota Ambon Provinsi Maluku*. 9–25.
- [10] Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *Perspektif*, 9(2), 307–313. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3588>
- [11] Siswanto, L. (2017). Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi. *Respati*, 7(19), 15–24. <https://doi.org/10.35842/jtir.v7i19.22>
- [12] Tamitiadin, D., Dewi, W. W. A., & Adila, I. (2019, April). Inovasi Model Mitigasi Bencana Non Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi Dan Kerjasama. In *Conference On Communication and News Media Studies* (Vol. 1, pp. 204-204).